



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA



**DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dan atas segala Rahmat – Nya maka Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2022 dapat disusun.

Indikator Kinerja Utama (IKU) ini merupakan uraian indikator kinerja utama dalam pelaksanaan kegiatan anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021 – 2026.

Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan gambaran indikator atau tolok ukur dalam capaian kinerja kegiatan / program kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2022.

Atas bantuan semua pihak dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini kami ucapkan terimakasih.

Samarinda, Maret 2022

Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
Kota Samarinda,



DR. Ibnu Araby, MM.Pd.

NIP. 196709071991031013

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DaftarIsi	ii
Surat Keputusan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).....	1
Daftar Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perindustrian Kota Samarinda.....	3
Lampiran Daftar Indikator Kinerja Dinas Perindustrian Kota Samarinda.....	6



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN

Jl. Ir. H. Juanda No.81 Graha Ruhui Rahayu Telp. (0541) 4113699

SAMARINDA-KALIMANTAN TIMUR

Website : www.diskukmp.samarindakota.go.id Email : diskukmp.samarindakota@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 800 / 03.1 / SK / 100.14

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA

Menimbang

- : a. Bahwa demi terarahnya pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Samarinda yang dijabarkan dalam Visi Misi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, maka diperlukan tolak ukur yang jelas dan sistematis untuk mengukur capaian kinerja organisasi pada setiap tahun perencanaannya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda tentang penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia

- Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor : 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2010;
 12. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Samarinda.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- KEDUA : Indikator sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda untuk kurun waktu 2021-2026.
- KETIGA : Setiap Bagian/Bidang yang ada di lingkungan Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda, dalam merencanakan program dan kegiatan wajib mengacu pada Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada Tanggal Maret 2022



DR. Ibnu Araby, MM.Pd.
NIP. 196709071991031013

Tembusan :

1. Inspektorat Daerah Kota Samarinda
2. Kepala Bagian Organisasi Setkot. Samarinda
3. Arsip

Lampiran : **Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda**
 Nomor : 800/ 031/SK/100.14
 Tanggal : Maret 2022

INDIKATOR KINERJA UTAMA

INSTANSI	:	DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN KOTA SAMARINDA
VISI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi Pemerintah Kota Samarinda : “Terwujudnya Samarinda Sebagai Kota Pusat Peradaban” 2. Visi Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda : “Terwujudnya Pembangunan Sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Industri sebagai Penggerak Ekonomi Masyarakat yang Berdaya Saing, Maju dan Mandiri”
TUGAS	:	Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Kelembagaan dan Pengawasan, serta Bidang Perindustrian
FUNGSI	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian; 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian; 3. Pelaksanaan koordinasi terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha kecil menengah dan perindustrian; 4. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan, pembangunan, pengembangan, pengawasan sumberdaya, sarana prasarana dan promosi koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan perindustrian; 5. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan 6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	CARA PERHITUNGAN IKU	SATUAN	SUMBER DATA	PENJELASAN	STRATEGI PENCAPAIAN IKU
1.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan Koperasi Sehat	Jumlah Unit Usaha Koperasi	Koperasi	Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026	Peningkatan Koperasi Sehat dapat dicapai dengan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan koperasi	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi Pengembangan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Pengembangan Kesehatan KSP/USP Koperasi Pengembangan dan pemberdayaan kelembagaan koperasi Pengembangan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Pengembangan pemberdayaan dan perlindungan koperasi
2.	Menumbuhkan dan memberdayakan kelembagaan koperasi dan UMKM	Peningkatan pelaku kewirausahaan	Jumlah Unit Usaha UKM	Unit usaha	Dokumen Renstra Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian Kota Samarinda Tahun 2021-2026	Peningkatan pelaku kewirausahaan dapat dicapai dengan melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM.	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan dan pemberdayaan UMKM

3.	Meningkatnya Pembangunan Industri	Persentase Kontribusi Sektor Industri Terhadap Pergolahan Terhadap PDRB	Jumlah kontribusi sector industri dibagi jumlah PDRB dikali 100	Persen	Peningkatan kontribusi sektor industri pengolahan dapat di capai dengan melaksanakan Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM), Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri dan Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri dan Industri Kecil Menengah (IKM) 2. Pengendalian dan pengawasan izin usaha industri 3. Membangun dan mengembangkan sistem informasi industri
----	-----------------------------------	---	---	--------	--	---

Samarinda, Maret 2022
 Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
 Kota Samarinda.



**INDIKATOR KINERJA
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERINDUSTRIAN
TAHUN 2021-2026**

SASARAN	INDIAKTOR KINERJA	SATUAN	SUMBER DATA	KETERANGAN
Terfasilitasinya pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota	Jumlah usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Fasilitas pemenuhan izin usaha simpan pinjam dan pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten atau kota.
Terfasilitasinya pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Jumlah kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Fasilitas pemenuhan izin usaha pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota
Terlaksananya penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah unit usaha koperasi yang telah dilakukan penilaian kesehatan	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pelaksanaan penilaian kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
Terselenggaranya pengharagaan kesehatan KSP/USP koperasi kewenangan kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan penghargaan kesehatan	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Penghargaan kesehatan KSP/USP Koperasi kewenangan kabupaten/kota
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
Meningkatnya pemahaman dan pengetahuan UKM serta kapasitas dan kompetensi SDM UKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang memahami pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Orang	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota
Terlaksananya penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf	Jumlah keluarga yang mengikuti penumbuhan kesadaran keluarga dalam	Keluarga	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Penumbuhan kesadaran keluarga dalam peningkatan taraf hidup

hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	peningkatan taraf hidup keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	keluarga melalui kehidupan berkoperasi dan pengembangan ekonomi lainnya
Terlaksananya pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah koperasi yang telah dilakukan pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan Kabupaten atau kota.
Terlaksananya pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/kota Kinerja	Jumlah koperasi yang memenuhi peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/kota Kinerja	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pemeriksaan kepatuhan koperasi terhadap peraturan perundang-undangan kewenangan Kabupaten/kota.
Me ningkatnya pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang memahami Pengetahuan Perkoperasian	Orang	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi SDM koperasi
Me ningkatnya produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Jumlah unit usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan Kabupaten/kota	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pendataan potensi dan pengembangan usaha mikro.
Terfasilitasnya pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro.
Terfasilitasnya kemudahan perijinan usaha mikro	Jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Fasilitasi kemudahan perijinan usaha mikro
Terfasilitasnya pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro	Jumlah unit usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan terhadap usaha mikro	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pemberdayaan kelembagaan potensi dan usaha mikro.
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan uasaha mikro	Jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro	Orang	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
Terfasilitasnya usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi	Jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM, serta desain dan teknologi	Unit usaha	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, sdm, serta desain dan teknologi.

Tersusunnya rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen rencana pembangunan industri	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Penyusunan rencana pembangunan industri kabupaten/kota
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan, pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan percepatan pengembangan, penyebaran dan perwilayahan industri
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pembangunan sumber daya industri	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengembangan sumber daya industri
Terselenggaranya koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi, sinkronisasi, dan pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana industri
Dievaluasinya pelaksanaan rencana pembangunan industri	Jumlah dokumen evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan industri	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pemberdayaan industri dan peran serta masyarakat
Terfasilitasinya Verifikasi Teknis Pemenuhan Kebutuhan PERSYARATAN Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi Teknis Pemenuhan Kebutuhan PERSYARATAN Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem OSS	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan industri
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha Industri, Perizinan Kawasan Industri dan Perizinan Perluasan Kawasan Industri Kabupaten/Kota	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri,	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota

Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)			Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)
Terdiseminasi dan Terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINAS	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Dokumen	Kepmendagri No.050-5889 tahun 2021	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas